

## **Kepemimpinan Dalam Perspektif Sistem Sosioekonomi.**

Oleh : Dr. Kristiya Kartika, M.Si, M.Kom \*)

Ditemukannya mesin-mesin-teknologi baru yg mempengaruhi babak perubahan sejarah dan respons masyarakat dunia, merupakan salah satu elemen strategis dalam kajian substansi kepemimpinan dunia. Revolusi Industri pertama serta Revolusi Industri kedua terbukti sangat mempengaruhi gerak dan arah kehidupan masyarakat global diberbagai bidang.

Temuan mesin dan teknologi baru bersumber dari keterampilan dan keahlian yg berasal dari individu atau sekumpulan individu anggota masyarakat. Temuan mesin dan teknologi baru, bila ditelaah dari aspek pemanfaatannya serta implikasinya (positif dan negatif), memerlukan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Dalam menyusun, mengkaji, menilai dan mengatur segala aspek yg menyertainya, khususnya dimensi manfaat bagi masyarakat, diperlukan kepemimpinan dari komunitas yg berhak atas pengaturan, penggunaan dan pemanfatannya secara luas serta menyeluruh. Komunitas itu yg berhak mengatur segalanya, inklusif dalam perspektif kedepan. Komunitas itu juga menetapkan aspek keadilan, kegunaan, keuntungan dan ancaman kerugian, yg bermuara pada terminologi efektivitas dan efisiensi.

Kepemimpinan merupakan asas dasar yg melandasi pelaksanaan fungsi-fungsi diatas yg didalamnya memiliki dimensi "konsep", "aplikasi", serta "supervisi".

Implisit pada kajian terhadap Kepemimpinan, dalam level kenegaraan-kemasyarakatan khususnya, tidak pernah terlepas dari inspirasi yang berdimensi sistem sosial, politik, ekonomi, kultural, yg menjadi garis "ketentuan moral" .

Inspirasi itu menjadi tuntunan, ikatan dan arah pelaksanaan tugas sebuah kepemimpinan.

Yg paling mendasar, adalah dimensi sosial-ekonomi yg dilandasi ajaran idiologi tertentu. Didalamnya memiliki nilai2 dasar dan nilai2 instrument. Nilai2 dasar pada dasarnya berupa "dalil-dalil" mendasar/berakar yg secara teoritis tidak bisa berubah atau dirubah. Nilai-nilai dasar berupa pemikiran, pola tindakan maupun langkah yg terumuskan melalui proses kebiasaan dalam kehidupan sejak dan akibat terjadinya histori yg monumental tertentu di komunitas tertentu, disertai pengkajian, penilaian, pendalaman, analisis kritis-obyektif dan evaluasi terkait berkembangnya nilai-nilai instrument.

Salah satu nilai Instrument adalah temuan teknologi dan mesin baru dengan segala implikasinya di berbagai bidang. Nilai instrument atas pertimbangan kegunaannya bagi kepentingan masyarakat dan individu, serta kepentingan lain, bisa diadopsi sebagai nilai dasar baru sebuah idiologi. Yg perlu menjadi catatan historis pula, bahwa upaya atas perubahan nilai-nilai dasar maupun nilai-nilai instrument idiologi sebuah Negara kerap dan hampir selalu disertai pergolakan sosial sampai kekerasan hingga berupa peperangan. Bahkan sampai perpecahan kekuasaan, pelepasan otoritas dan pemisahan wilayah sebuah negara menjadi berbagai komunitas Negara berkedaulatan baru.

Nilai2 idiologi bukan hanya sekadar kumpulan materi ideal suatu komunitas, tapi juga menjadi kriteria untuk lahirnya sebuah kepemimpinan yg memiliki keabsahan secara politik dan kultural.

### **METODE BERPIKIR SEBAGAI LANDASAN KEPEMIMPINAN.**

Inspirasi penting yang menjadi landasan/ dasar kepemimpinan nasional adalah metode berpikir. Metode berpikir yg dimaksud adalah cara merumuskan sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan yg ada dan lahir dalam masyarakat.

Metode berpikir pula yg antara lain mewarnai lahirnya perbedaan antar-ideologi dengan turunannya berupa perbedaan sistem sosial dan ekonomi.

Ideologi yg berkembang sejak lama mewarnai dunia adalah Kapitalisme dan Sosialisme. Masing2 menitikberatkan pada kepentingan utama komunitas tertentu dalam masyarakat. Meski kemudian kedua ideologi tersebut mengalami perkembangan yg dinamis.

Kapitalisme secara prinsipal mengutamakan terwujudnya kepentingan material yg terfokus sebagai kepentingan kapital/ modal. Kapital adalah senjata ampuh yg harus dimiliki untuk perbaikan/peningkatan kualitas hidup individu maupun sekelompok individu. Demi kepentingan sebuah negara untuk menjamin kehidupan yg lebih tinggi status warga negaranya, dirumuskan pola kerjasama dengan negara lain, melalui pola pemanfaatan kelebihan-kelebihan negara lain tersebut.

Dengan disertai rumusan teknis kerjasama yang saling menguntungkan antar negara yg bekerjasama, disertai pula penghargaan kebersamaan yg seimbang. Meski dalam prakteknya, Negara yg lebih "siap" dan "kuat" dalam banyak hal akan selalu memperoleh keuntungan lebih besar, disertai 'stempel dunia' sebagai negara yg menghargai dan menghormati perbedaan dan menolak prinsip asas Otoriter.

Rumusan riil atas terminologi "siap" dan "kuat" adalah siap dalam sistem permodalan dan proses produksi; kuat dalam relasi dunia serta satuan militer-tempur, berupa persenjataan kualitas tinggi. Sehingga terminologi "siap" dan "kuat" sesungguhnya merupakan Pilar dari pengaruh kuat bahkan dominan sebuah negara tertentu kepada negara lainnya. Pilar lain yang utama adalah diakui hak kepemilikan pribadi, individualisme ekonomi, dan persaingan bebas. Implikasi lebih lanjut, Kapitalisme merangsang perilaku "self interest" (mementingkan diri sendiri), mengutamakan hak perorangan (individualistik) / kebebasan rakyat melakukan aktivitas ekonomi tanpa intervensi Negara. Juga menetapkan harga sebagai penentu perimbangan antara penawaran dan permintaan pasar.

Sedangkan Sosialisme, adalah sebuah ideologi yang memiliki karakter atau ciri khas adanya kepemilikan sosial atas alat produksi serta pengelolaannya dalam sistem manajemen yg dilandasi kepentingan kolektif. Dalam Sosialisme, Negara memiliki posisi sangat strategis. Negara memiliki kewenangan dalam mengatur upah, harga barang dan jasa, berbagai aset serta lainnya.

Substansinya, Sosialisme mengutamakan kebersamaan dalam banyak aspek, terutama ekonomi, sosial dan politik. Manifestasinya, semua tanggungjawab yg dilandasi kolektivitas tersebut dibebankan/diberikan kepada Negara dengan tujuan menciptakan kebersamaan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Tujuan utama lainnya dari Sosialisme mewujudkan kesatuan yang anti perpecahan masyarakat.

Penggunaan dan penetrapan Kapitalisme dan Sosialisme secara faktual telah memperkaya aktivitas pengembangan pemikiran dan kajian tafsir, sehingga melahirkan sejumlah dalil yg mengatur hubungan sosial-politik/budaya yg bersifat multi-tafsir.

Baik dikaitkan dengan pengesahan atau keabsahan sebuah kekuasaan negara dan segala implementasinya, atau bahkan lahirnya teori baru sebagai penguatan kehadiran komunitas elite yg mengkaitkan kekuasaan pengelolaan kekayaan dengan kekuasaan politik negara.

Lahirnya komunitas Oligarki, merupakan sebuah contoh yg telah menjelma menjadi realitas efektif. Ideologi2 serta teori2 yg mengabsahkannya pada dasarnya tetap menggunakan perumusan pedoman implementasinya berdasarkan metode berpikir yg telah dirumuskan, dikembangkan, dan diterapkan para Pemikir berabad-abad yg lalu, dengan beberapa penyesuaian rasional.

Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki nilai-nilai dasar, yang sudah terumuskan dan tersosialisasi sejak awal bangsa ini merdeka. Bahkan nilai-nilai dasar telah menjadi pedoman hidup masyarakat yang manifestasinya tertuang dalam bentuk tradisi, kebiasaan, adat istiadat ataupun kesepakatan komunitas-komunitas dalam masyarakat tertentu yg bahkan disertai sanksi sosial, politik, budaya atau lainnya, sebelum dokumen-dokumen negara menegaskannya secara formal berlaku. Karena sesungguhnya setelah mengarungi perjalanan hidup yang cukup lama dengan berbagai bentuk/manifestasinya, masyarakat secara bertahap menyepakati adanya nilai-nilai sosial-budaya yang dianggap cocok, karena menguntungkan mayoritas sub-komunitas tertentu sampai komunitas yg

besar.

Pembahasan kepemimpinan nasional tidak bisa lepas dari proses dan mekanisme beroperasinya pemanfaatan dan pengelolaan asset-asset ekonomi terkait dengan operasionalisasi kekuasaan.

Ditinjau dari sudut pandang ideologi yg mendasarinya, praktek ekonomi-politik yang terjadi di Indonesia sejak Orde Baru adalah pemanfaatan sisi2 tertentu yg dianggap sesuai dan menguntungkan dari kedua ideologi besar tersebut demi kepentingan kekuasaan. Misalnya dari nilai-nilai SosialismeReligius yang sesungguhnya merupakan landasan nilai-nilai dasar Pancasila, tidak diakomodir secara eksplisit dan tidak dilaksanakan dalam pengembangan dan operasional Ekonomi-Politik Negara-bangsa. Salah satu contoh yg sudah menjadi topik berbagai diskusi terbuka adalah tentang peran strategis koperasi yg telah tergusur baik dalam dimensi teoritikal maupun praktikal.

Gelombang kritik besar yg diarahkan kepada Orde Baru, justru karena pemerintah/penguasa mengetrapkan dalil-dalil Kapitalisme, meski tidak secara menyeluruh. Kepentingan utamanya adalah untuk mempertahankan kekuasaan.

Para Pemikir dan Akademisi serta Pengamat Barat, seperti Jeffrey A.Winters bahkan berpendapat bahwa sebenarnya di pemerintahan Indonesia tidak ditemukan lembaga-lembaga birokratis-pluralis pada inti ekonomi-politik moderen

Indonesia maupun prestasi pemimpin besar pembangunan.

Sebaliknya penciptaan dan pengelolaan "Oligarki Sultanistik" yang sukses oleh kekuasaan sangat tergantung pada kemampuannya menghambat perkembangan institusi dalam arti yg sewajarnya dan membengkokkan prosesnya agar selaras dengan kepentingan pribadi. Dengan demikian yg lebih banyak dilakukan pengkajian para Akademisi dan Ilmuwan bukan perhatian pada "kebangkitan kapital" tapi pada "kebangkitan oligark".

Kebangkitan kapital adalah terminologi yg merujuk pada pelaku dan kegiatan ekonomi yg menjadi aksioma khas cara produksi kapitalis. Kebangkitan Oligark hanya berkonsentrasi ekstrim pada kekayaan pribadi, yg menggunakan cara apapun, termasuk politik-kekuasaan Negara guna pertahanan kekayaan yg terkait.

Dalam beberapa periode perjalanan sejarah, konsentrasi ini kerap dilakukan oleh Wiraswasta Kapitalis. Tapi konsentrasi ini juga telah dilaksanakan dengan cara lain, yakni pelakupelaku yg dalam mengakumulasi kekayaannya tidak terkait dengan metode Kapitalisme, mekanisme pasar, kelembagaan dan aturan hukum perundang-undangan.

Substansinya, yg telah terjadi di Indonesia hingga kini, masih berlangsung langkah dan proses memperkaya diri secara besar-besaran oleh lapisan elite masyarakat. Saat memperkaya diri itu Indonesia terlibat dan terkait dengan sistem Kapitalisme Global, kemudian kekayaan dan Oligark diciptakan oleh proses penghisapan serta penguasaan atas

kekayaan sumber daya alam dan uang rakyat.

Menurut kajian lebih lanjut disimpulkan bahwa khusus di Indonesia proses diatas merupakan "ekstraksi" kekayaan dari penciptaan kekayaan. Perpaduan antara "Oligarki" dan "Sultanistik" mewarnai pola kepemimpinan Indonesia hingga kini.

Bukan mustahil akan ada kajian ilmiah yg menyimpulkan lebih tegas lagi bahwa sampai kini dan bahkan mendatang, kepemimpinan Indonesia masih menggunakan Ciri khas sistem sosial-ekonomi Feodalisme yg bersentuhan dengan Kapitalisme. Feodalisme dengan Ciri Sultanistik, nepotisme, dan dinasti. Sedangkan Kapitalisme dengan Ciri utama penguasa dan masyarakat yg dikuasai kepentingan individu atau kelompok elite masyarakat dan keluarga dinasti. Bukan kepentingan mayoritas-massa Rakyat. Kepemimpinan yang demikian, bukan kepemimpinan yg sesuai dengan nilai-nilai dasar idiologi bangsa-negara kita Pancasila. Yang berkuasa riil dan kongkrit di Indonesia sejak Orde Baru sampai kini adalah Kelompok Oligarki yg menguasai kekayaan dan sekaligus menguasai pemerintahan\*\*\*\*\*

---

\*) Dr. Kristiya Kartika, M,Si, M.Kom, lulus pendidikan terakhir

Program Doktor dari Faculty Of Graduate School of Business Management, San Beda College, Manila, 2009. Pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Ketua Dewan Kehormatan Nasional Inkindo,

Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Kementerian PUPR, Vice President,

Technical Consultancy Development Program for AsiaPacific ( TCDPAP) di New Delhi, Wakil Ketua Tim Konsultansi pada Kantor Menteri Muda Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Anggota Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan Tim Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.

Dalam kegiatan kepemudaan, antara lain pernah terpilih sebagai Ketua Presidium GMNI, Ketua DPP KNPI, Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) , Peserta

International Course of Young Political Leaders (ICYPL) in

USA, Ketua Delegasi Pemuda Indonesia dalam Konferensi Pemuda Se-Asia Pasifik di Kuala Lumpur. Kini juga menjadi

Pengurus Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB). -----